

Judul : Guna mempermudah akses KPR, pemerintah wacanakan hapus kredit macet di bawah Rp 1 juta
Tanggal : Sabtu, 18 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Guna Mempermudah Akses KPR

Pemerintah Wacanakan Hapus Kredit Macet Di Bawah Rp 1 Juta

Pemerintah memiliki wacana penghapusan kredit macet di bawah Rp 1 juta bagi calon pembeli rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Langkah ini dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap bisa mengajukan KPR. Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berbagai kendala yang dihadapi sektor perumahan. Termasuk masalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikeluhkan para pengembang. "Pak Menkeu berkenan untuk

membantu nanti kebijakan dengan OJK, sehingga nanti dari segi *demand* perumahan bisa terselesaikan," ujar pria yang akrab disapa Ara ini, Selasa (14/10/2025). Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan, usulan tersebut akan setelah Menteri PKP Maruarar Sirait melaporkan bahwa para pengembang perumahan bersedia menanggung tunggakan kecil yang dimiliki calon pembeli rumah. "Kata Pak Ara sih pengembangnya mau bayar itu. Kalau itu mau bayar ya sudah enggak apa-apa," kata Purbaya, di kawasan JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Dia menjelaskan, permohonan kredit rumah dengan skema KPR sangat besar. "Katanya ada *demand* yang dari sekitar 100.000 orang enggak bisa masuk karena mereka masih di *blacklist* karena punya pinjaman yang belum dibayar," katanya. Meski demikian, Purbaya menegaskan, bahwa dia akan terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan melibatkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan OJK. "Senin baru saya minta laporan dari Kepala BP Tapera. Kamis minggu depan saya akan ketemu dengan OJK untuk melihat sebetulnya seperti apa.

Tapi tergantung dari temuan hari Senin," ucap Purbaya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro mendukung rencana penghapusan kredit di bawah Rp 1 juta pada SLIK OJK. Menurut dia, kebijakan tersebut akan mempermudah orang untuk dapat rumah maupun untuk hal-hal lain yang berurusan dengan perbankan. "Karena SLIK OJK atau dulu bernama BI Checking, digunakan untuk mengajukan suatu akad kredit, baik digunakan untuk perumahan maupun untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat)," ujar Fauzi

kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (17/10/2025). Sementara itu, Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo menilai usulan ini baik untuk masyarakat. Tetapi, dia meminta Pemerintah untuk mengkajinya terlebih dahulu. "Harus jelas kriteria seperti apa penerima dari penghapusan kredit ini," ujar Rio kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (16/10/2025). Untuk mengetahui pandangan Fauzi Amro dan Rio Priambodo mengenai wacana penghapusan kredit Rp 1 juta untuk calon pembeli rumah dengan skema KPR, berikut wawancaranya.

FAUZI AMRO, Wakil Ketua Komisi XI DPR

Sasarannya Untuk Menengah Ke Bawah



“Sasaran kebijakan ini memang untuk masyarakat menengah ke bawah.”

Apakah pandangan Anda dengan usulan penghapusan kredit macet maksimal Rp 1 juta bagi calon pembeli rumah dengan skema KPR?

Secara pribadi, saya mendukung ya. Dulu kami juga menyarankan agar kredit dengan nilai di bawah Rp 1 juta, dilupus saja SLIK OJK-nya.

Artinya ide semacam ini sudah pernah ada ya?

Sudah ada. Dulu kan namanya hapus buku dan dulu kan target Pemerintah untuk kredit di bawah Rp 1 juta. Memang syaratnya cukup rumit karena pengajuan penghapusan itu harus sudah diajukan lima tahun sebelumnya. Tapi sekarang, kalau masih ada yang di bawah Rp 1 juta yang bermasalah SLIK OJK-nya, sebaiknya semuanya dihapuskan. Karena

tujuannya agar masyarakat lebih mudah mendapatkan rumah, lebih mudah berusaha, dan lebih mudah mengakses pembiayaan perbankan.

Teknisnya akan seperti apa ya? Tentu harus dilihat juga peruntukannya seperti apa. Karena itu, Kementerian Keuangan, Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) dan OJK perlu duduk bersama. Harus dilihat, ada berapa banyak nasabah yang bermasalah pada SLIK OJK-nya yang untuk perumahan, UMKM, maupun KUR. Sasaran kebijakan ini memang untuk masyarakat menengah ke bawah.

Apakah program ini akan mendukung program pengadaan tiga juta unit rumah?

Target Pemerintah pada program tiga juta rumah itu tergantung siapa pembelinya, baik di perkotaan, pedesaan maupun di kawasan relayan. Nah kalau banyak masyarakat yang terkena di *blacklist* SLIK OJK, tentu target tiga juta rumah itu akan sulit tercapai. Hal yang sama berlaku untuk UMKM. Karena itu, kami berharap Pemerintah segera mengeksekusi penghapusan SLIK OJK maksimal Rp 1 juta dan kami akan ikut mengawasinya.

Bagaimana dengan yang lebih dari Rp 1 juta?

Itu tidak bisa, karena batas maksimalnya memang Rp 1 juta. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi meningkat, pembiayaan perumahan lebih lancar, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah ikut meningkat. ■ **WAM**

RIO PRIAMBODO, Sekretaris YLKI

Harus Jelas Kriteria Calon Penerima



“Pemerintah perlu menerbitkan aturan atau petunjuk teknis pelaksanaan agar tidak bias.”

Apakah pandangan Anda dengan usulan penghapusan kredit macet maksimal Rp 1 juta bagi calon pembeli rumah dengan skema KPR?

Tentunya, YLKI sangat setuju terkait dengan hal itu, karena akan mempermudah akses rakyat mendapatkan pembiayaan rumah. Namun, sebelum dilaksanakan, Pemerintah harus panggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan terlebih dahulu.

Untuk pelaksanaannya, apa yang perlu diperhatikan?

Pastinya terkait karakteristik konsumen yang ingin dihapus hutang atau kreditnya itu.

Dengan maksimal kredit macet di angka Rp 1 juta, Anda setuju?

YLKI mendorong bahwa kelas menengah ke bawah bisa menjadi prioritas jika benar program ini dilaksanakan.

Apakah saran Anda kepada Pemerintah agar program ini bisa terlaksana dengan baik?

Pemerintah perlu menerbitkan aturan atau petunjuk teknis pelaksanaan agar tidak bias. Berkaca pada kasus Covid-19, yang pada saat itu Pemerintah memberi relaksasi kredit dengan aturan yang jelas.

Lantas apa harapan Anda kepada Pemerintah terkait wacana program ini?

YLKI meminta program ini segera direalisasikan sebelum akhir tahun 2025.

Adakah catatan lain dari Anda terkait wacana kebijakan ini?

Harus dicatat juga ya, bahwa mungkin saja konsumen yang hutangnya macet tersebut bukan karena tidak ada kemampuan bayar.

Terus apa alasannya?

Hal itu terjadi karena proyek dari perumahannya mangkrak atau terdapat masalah dalam pembangunannya. Sehingga konsumen memilih berhenti mengangsur. ■ **WAM**